

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung
- , 2007, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2000, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2004, *Buku II Komplikasi Hukum Jaminan*, Mandar Maju, Bandung.
- Bosy, Benny, 1997, *Perkembangan Terbaru Sertifikat (Tanah, Tanggungan dan Concominium)*, Mediatama Saptakarya, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- , 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- HS, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasnadi, dan Purwahid Patrik, 1996, *Hukum Jaminan: Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*, Kencana, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1999, *Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Ridwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Teks*, Alfa Beta, Bandung.
- Saifurrachman, dan Habib Adjie, 2002, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung.

- Saleh, K, Wantjik, 1990, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satrio, J, 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simorangkir, JCS, 2005, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S,W, 2009, *Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.

B. JURNAL DAN PENELITIAN

- Sudiby, Efty Hindaru dan Amin Purnawan, 2017, “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Izin Roya Hak Tanggungan karena Hapusnya Hutang dalam Prespektif Kepastian Hukum”, *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 2 Juni 2017.
- Isabella, Marissa, 2012, *Implikasi Yuridis Hilangnya Sertifikat Hak Tanggungan dalam Proses Roya*, Yogyakarta, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sutrayeni, Ida Ayu Made, 2016, *Pelaksanaan Roya Terkait Hilangnya Sertifikat Hipotik Setelah Berlakunya Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, Yogyakarta, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692)

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Menteri Agraria Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 113)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

D. INTERNET

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikat> diakses 5 maret 2018.

Sanjaya, Ade, “Pengertian Hak Tanggungan Definisi Unsur Sifat Subjek dan Objek serta Tahap Pembebanan, Hukum Undang Undang”, <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-hak-tanggungan-definisi.html> diakses 8 Januari 2018.